



Sekretariat Keadilan dan Perdamaian / Office for Justice and Peace

KEUSKUPAN JAYAPURA
KOTAK POS 1379
JAYAPURA 99013
PAPUA, INDONESIA

DIOCESE OF JAYAPURA
Tel: +62 – 967 – 534993
Fax: +62 – 967 – 534993
E-mail sekkp@jayapura.wasantara.net.id

Jayapura, 19 November 2002

No. 323/TB/02/4.7.

KERANGKA ACUAN LOKAKARYA

MEMBANGUN BUDAYA DAMAI

MENUJU

PAPUA TANAH DAMAI

SENTANI 25 – 30 NOVEMBER 2002

Pendahuluan

Gagasan “Papua Zona Damai” sudah tidak asing lagi bagi telinga kita semua. Gagasan ini muncul ditengah-tengah segala ketegangan yang menandai kehidupan kemasyarakatan selama tahun-tahun terakhir ini. Selama 4 tahun terakhir bangsa Papua berusaha untuk “membebaskan diri”: Membebaskan diri dari segala ketakutan, dari segala rasa minder, dan ingin bangkit kembali sebagai bangsa yang patut diakui dalam jati dirinya. Perjuangan demikian ternyata menimbulkan pelbagai tanggapan/perasaan. [1] *Perasaan lega* pada masyarakat Papua sendiri, karena akhirnya boleh keluar dari sikap kebisuan, dan boleh menyampaikan aspirasinya. [2] *Perasaan cemas* pada penduduk Tanah Papua yang bukan penduduk asli. [3] *Perasaan waswas / siap siaga* pada pihak berwajib yang menafsirkan perubahan sikap ini menjadi “sikap melawan” dan yang bersifat separatis.

Terdapat pelbagai persepsi berhubungan dengan upaya “membebaskan diri” baik di dalam kalangan bangsa Papua sendiri maupun di kalangan “pemantau dari luar”. Namun yang jelas bagi semua ialah bahwa terdapat suatu suasana kemasyarakatan yang sedang dan akan menimbulkan ketegangan yang sangat serius kalau tidak ditangani dan didekati secara arif. Yang jelas juga

ialah bahwa suasana kemasyarakatan ini tidak dapat ditanggapi dengan menggunakan kekerasan, karena jawaban demikian hanya dapat memperparah suasana ketegangan yang sudah menjadi hasil dari sejarah bangsa Papua selama ini. Maka, muncullah gagasan supaya diciptakan suatu suasana damai, "Papua Zona Damai" yang memungkinkan bagi segala pihak untuk mencari jalan bersama hingga para warga Papua dapat hidup dalam ketenangan sambil menyelesaikan konflik-konflik yang melatarbelakangi upaya pembebasan diri ini.

Pelbagai medan konflik

Ketegangan suasana kemasyarakatan terjadi karena sejarah selama puluhan tahun yang ditandai penindasan serta "ingatan kolektif" mengenai pengalaman-pengalaman yang tersirat didalamnya (*memoria passionis*). Terdapat juga ketegangan kemasyarakatan karena adanya faktor-faktor yang mudah dapat memicu konflik di masa mendatang. Konflik-konflik di masa mendatang dapat berasal dari pelbagai sumber. Sejumlah faktor dapat kami uraikan secara singkat di bawah ini¹.

[1] Perbedaan aspirasi politik

Perbedaan aspirasi politik khususnya menyangkut masuknya Papua ke dalam Republik Indonesia belum mencapai suatu penyelesaian yang memuaskan. Sedangkan pemberian Otonomi Khusus sebagai jalan keluar ternyata belum mampu menjawab segala aspek aspirasi sebagaimana sedang hidup ditengah-tengah masyarakat; malahan pemberian Otonomi Khusus bisa sampai menimbulkan suatu ketegangan antar orang Papua sendiri.

[2] Penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan

Dalam rebutan jabatan dengan prioritas pada peluang bagi "Putra Daerah" terdapat titik-titik rawan yang amat mudah pecah menjadi konflik antar suku. Apalagi penyakit KKN serta penyakit mental proyek yang sudah lama menjangkiti pemerintah pusat dengan mudah dapat menular ke Papua.

[3] Pemerintahan yang semu

Walau diharapkan supaya pemerintahan di Papua makin berkembang menuju suatu pemerintahan sipil, peranan TNI sangat menonjol dan makin hari makin menentukan. Seakan-akan TNI dapat berperan terlepas dari kuasa Pemerintah Sipil². Apalagi sulit disangkal bahwa peranan TNI tidak lepas dari kepentingan-kepentingan ekonomis, dan sering memiliki suatu agenda

¹ Dalam uraian singkat ini kami bertitiktolak dari pemahaman yang dikemukakan oleh Mgr. Leo L. Ladjar ofm – Uskup Jayapura - sewaktu tampil sebagai key-note speaker pada "Konferensi Perdamaian untuk papua", tgl. 15-16 Oktober 2002, di Jayapura.

² Contoh yang paling aktual: TNI sedang melatih kelompok masyarakat sebagai "kelompok pembela negara"; pelatihan diadakan selama bulan Oktober dan November 2002.

tersendiri. Peranan TNI nyatanya menjadi sumber konflik dan ketegangan ditengah-tengah masyarakat.

[4] Kecurigaan antar kelompok etnis dan suku

Kurangnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur beserta hak-hak yang melekat padanya adalah salah satu medan konflik lain. Penghormatan kepada seorang manusia karena “dia manusia”, belum menjadi pandangan dan sikap hidup banyak orang diantara kita. Nilai dan martabat seorang manusia rupanya lebih diukur menurut penampilan lahiriahnya (warna kulit dll.) atau menurut kekayaan dan kedudukan sosialnya.

[5] Kecurigaan antar kelompok agama

Naluri manusia untuk bersaing dan menjadi lebih unggul dari saingannya mendorong manusia untuk mengerahkan Tuhan Allahnya menjadi pendukung dalam persaingan. Dari persepsi yang sempit itu timbullah dalam agama-agama sepanjang sejarah sikap fanatik yang negatif dari kelompok-kelompok ekstrem yang mau mengungguli yang lain sampai mau menghapus keberadaan yang lain dengan membenarkan segala cara. Dengan persepsi yang demikian tentang Tuhan, orang beragama tidak menjadi pembawa damai tetapi sebaliknya menjadi pembawa ketegangan dan kerusuhan dengan segala tindak kekerasan yang persis bertentangan dengan hakikat Tuhan sendiri sebagai kasih dan kebaikan.

[6] Kesenjangan sosial ekonomi

Salah satu medan konflik potensial yang sangat dasariah adalah medan sosial-ekonomi yang ditandai suatu kesenjangan antara lapisan masyarakat. Ada yang memiliki banyak, bahkan berlebihan, dan ada yang memiliki sedikit bahkan terus-menerus hidup dalam kekurangan. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin menjadi ketidakadilan (akibat dari usaha untuk membela keberadaannya tanpa kompromis) yang menyebabkan hubungan antara manusia tidak selaras. Ini suatu potensi konflik yang mengancam dan merusakkan damai.

Membangun budaya damai

Mengingat sejumlah sumber konflik sebagaimana diuraikan di atas, makin hari makin banyak pribadi warga maupun lembaga berkeyakinan bahwa konflik-konflik potensial yang ada hanya dapat dicegah kalau kita bersepakat untuk hidup bersama dengan tenang dan dalam suatu keterbukaan satu sama yang lain. Yang perlu dibangun bersama adalah “budaya damai”,

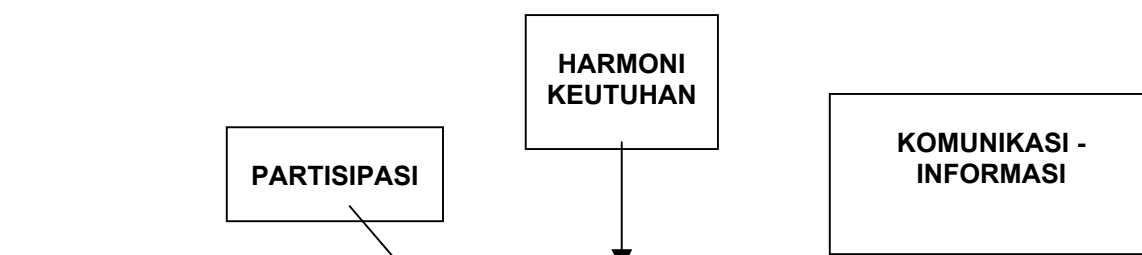
sebagai alternatif dari penyelesaian masalah dengan pemakaian kekuasaan serta kekerasan.

Membangun budaya damai itu bukan soal bicara saja, namun menuntut suatu perwujudnyataan konkrit. Malahan sudah tentu bahwa karya 'membangun budaya damai' menuntut banyak keringat dan suatu kemauan sejati (*political will*) bersama untuk menjawab masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Permasalahannya sangat majemuk, dan menyangkut baik aspek sosial-budaya, ekonomi maupun politik, namun akhirnya memiliki suatu dasar yang sama, yakni bangsa Papua mau "bebaskan diri dari segala bentuk penindasan".

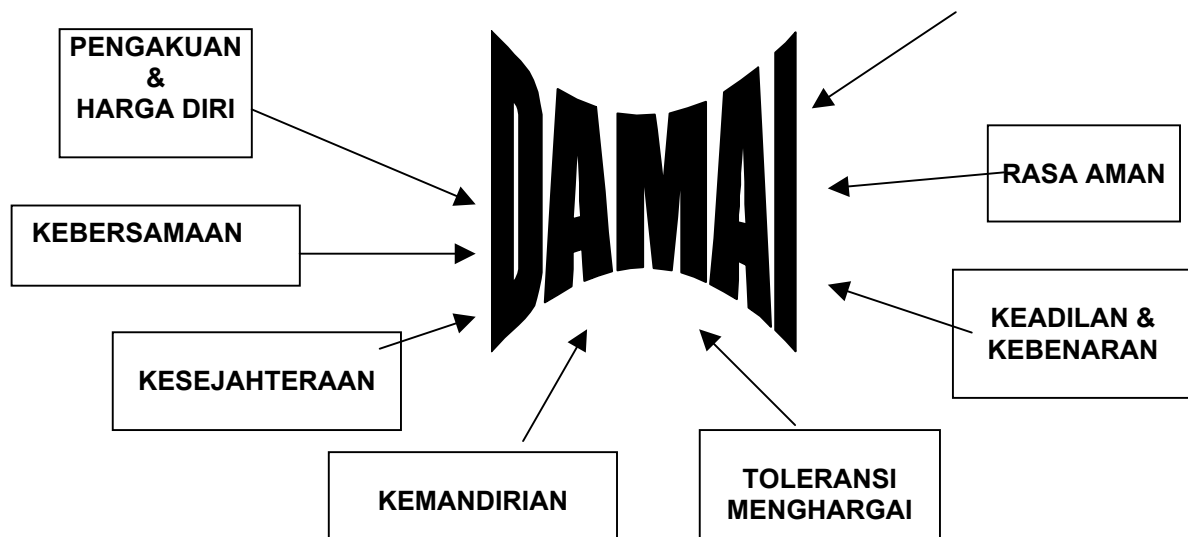
Menciptakan "Papua Tanah Damai"³ (membangun budaya damai di Papua) merupakan suatu sarana menuju pembebasan sebagaimana diartikan diatas ini, dan sekaligus merupakan kondisi mutlak yang memungkinkan suatu penyelesaian permasalahan tanpa kekerasan. Maka, "Papua Tanah Damai" adalah suatu 'kondisi kemasyarakatan' dan bukan suatu 'medan geografis yang bebas kekerasan' ditengah-tengah zona-zona perang. Pengertian terakhir tadi kadang-kadang muncul dan sedang disosialisasikan oleh pihak TNI di Papua, namun perlu ditekankan bahwa pemahaman demikian tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya diharapkan dan dimaksudkan masyarakat Papua saat gagasan "Papua Zona Damai" mulai muncul dan dimasyarakatkan.

Pelbagai komponen "membangun budaya damai"

Sebagai kerangka pengembangan konsep "Membangun Budaya Damai" kami dapat bertitik tolak dari sejumlah komponen yang menentukan ada-tidaknya "rasa damai". Dibawah ini kami mencatat sejumlah komponen.



³ Kami lebih suka memakai istilah "Papua Tanah Damai" daripada "Papua Zona Damai" mengingat bahwa damai yang dimaksudkan meliputi seluruh Tanah Papua, dan mengingat bahwa peristilahan "Zona Damai" terlalu mudah dapat dikaitkan dengan suatu pembagian geografis dalam "Zona Damai" dan "Zona Perang".



Keterangan singkat:

Kalau kita berpikir mengenai “DAMAI”, sejumlah hal yang kita ingin supaya terlaksana dan dapat dihayati bersama adalah: kita ingin supaya hidup kita aman, supaya kita dihargai dalam kepribadian kita masing-masing walau berbeda, kita ingin supaya ada makanan/kesejahteraan, kita ingin supaya diberlakukan adil dan sesuai kebenaran, kita mau diakui sebagai pribadi orang, sebagai suku, kita tidak mau hidup dalam ketergantungan saja dan kita mau atur diri, kita mau supaya suara kita terdengar dan diberikan tempat, dan akhirnya kita mau supaya hidup kita bersama segala alam semesta serta isinya menjadi harmonis, bernafas kesatuan dan keutuhan.

Kata-kata tadi semua merupakan kata yang sangat bernilai, dan yang dapat menjadi pegangan dalam perumusan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan kita dalam usaha “Membangun Budaya Damai”. Memang setiap “kata kunci” memiliki muatan “politik praktis”, berarti: menuntut suatu kelakuan yang sesuai.

PARTISIPASI:

Sebagai warga masyarakat kita berhak berperan membangun dunia kita; seperti dulu – dalam adat jelas peranan dari warga masing-masing – dewasa ini pun diharapkan supaya semua warga diberikan tempat untuk mengambil bagian aktif dalam “mengatur rumah besar” kita. Partisipasi ini dapat diperjuangkan melalui misalkan Lembaga Adat, melalui MRP, atau bentuk keorganisasian lainnya, melalui pengungkapan pendapat, melalui pengawasan atas kebijaksanaan pemerintah dst. Partisipasi berarti terbuka untuk bekerja sama dengan pihak lain.

Dewasa ini partisipasi menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Papua. Suara, keinginan dan kebutuhan konkret masyarakat perlu diangkat agar menjadi bagian dari setiap kebijakan yang hendak dibuat penguasa. Pengalaman di masa lalu bahwa unsur ini hampir tidak tampak sehingga rakyat di Papua hanya menjadi 'obyek' yang dianggap bisu dalam menerima pola pembangunan yang diterapkan pemerintah. Maka berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, hanya berjalan sesuai dengan kemauannya, bukan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan nyata masyarakat.

Bahkan dalam era Otonomi Khusus yang menempatkan wewenang sepenuhnya ada pada tangan Pemerintah Daerah Papua, maka aspek pengawasan dan partisipasi masyarakat sangat perlu dilakukan. Bagaimana dengan dana-dana besar yang tersedia dalam era Otsus, apakah dibiarkan saja dimanfaatkan dengan pola-pola lama yang penuh dengan tindak korupsi? Sudah saatnya warga Papua menjadi "**Pelaku Sejarah**", bukan "**Korban Sejarah**" lagi!

KEBERSAMAAN

Partisipasi untuk sebagian besar bergantung pada penghayatan para warga: sejauh mana apa yang terjadi adalah 'perkara saya' dan 'perkara kita bersama'. Tingkat penghayatan akan kebersamaan terungkap dalam kata-kata sederhana tadi. Sering terdengar ungkapan yang menunjukkan sikap sebaliknya: "perkara itu ko punya", "masalah itu adalah masalah kamu, bukan urusan saya", "bukan problem saya", dan sejenisnya. Kuat-lemahnya penghayatan kebersamaan akan menentukan sejauh mana 'saya mau terlibat', 'saya mau mengambil bagian'.

Dapat dipertanyakan: apa yang menentukan 'rasa kebersamaan', 'rasa memiliki bersama' itu. Ikatan darah, atau "asal-usulnya" hidup kita bisa sangat menentukan 'rasa kebersamaan' ini. Sejarah bersama adalah salah satu faktor lain yang mengikat satu sama yang lain. Begitu juga penghayatan akan tanggung jawab bersama atas nasib sebangsa merupakan salah satu faktor pendorong partisipasi yang aktif dan nyata.

Dalam kerangka kebersamaan ini, dua pertanyaan penting perlu ditonjolkan dalam rangka memahami kenyataan di Papua. Pertama adalah pertanyaan mengenai hubungan antara warga pribumi dan non-pribumi. Inilah suatu pertanyaan yang tidak dapat dilalui, apalagi dalam suatu suasana kemasyarakatan yang begitu majemuk seperti di Papua ini. Kedua, perlu juga dipertanyakan secara serius sejauh mana rasa kebersamaan ini dihayati antar warga asli Papua sendiri! Jika suasana empat tahun belakangan ini menunjukkan tanda-tanda persatuan dikalangan orang Papua seiring dengan

gencarnya gerakan aspirasi merdeka, hal ini belum dapat menjadi jaminan untuk mengukur dinamika sesungguhnya di masyarakat. Kita masih bisa mendengar seruan semacam ini, “ko orang gunung, kami orang pantai” dalam menggambarkan identitas seseorang. Begitu juga pengkotak-kotakan berdasarkan denominasi agama yang ada. Bahkan primordial ‘sempit’ berdasarkan asal-usul suku tumbuh subur dalam dunia birokrasi – politik Papua di era Otsus plus Papuanisasi kini yang dalam beberapa kasus suksesi pejabat di beberapa tempat nyaris menimbulkan bentrokan massal diantara orang Papua.

KOMUNIKASI / INFORMASI

Partisipasi mengandaikan bahwa kita memiliki informasi, maka mengandaikan bahwa kita memiliki akses pada sumber-sumber informasi, dan bebas untuk terlibat dalam komunikasi mengenai apa yang diinformasikan kepada kita. Komunikasi / informasi adalah salah satu kunci dalam segala seluk-beluk partisipasi dalam dunia dewasa ini. Benar pula bahwa informasi yang salah dapat mudah menyesatkan orang, sedangkan informasi yang benar membantu untuk menempatkan diri serta sesamanya secara benar. Yang berlawanan dengan “tuntutan damai” ini adalah segala upaya sensor atau upaya untuk mengaburkan kebenaran. Sudah tentu media masa memegang suatu peran kunci dalam hal ini.

Informasi / komunikasi dapat dilakukan dalam berbagai wujud dan oleh siapa saja. Bisa secara lisan atau tulisan, melalui berbagai media yang ada dewasa ini. Dibutuhkan kemampuan dan daya kreasi kita untuk memanfaatkannya dalam menyampaikan apa saja yang kita inginkan. Di satu sisi unsur tanggung jawab berperan penting dalam pemilahan informasi yang hendak disampaikan. Di sisi lain, sebagai penerima informasi kita perlu menjadi kritis, menganalisa sejauh mana informasi benar adanya. Penting juga untuk melihat siapa yang menyampaikan informasi tersebut dan apa tujuan dibalik penyampaian itu.

Betapa pentingnya memperhatikan persyaratan tadi tercermin dalam kenyataan sebagai berikut: ternyata dinamika yang ada di kota-kota di Papua, berjalan timpang dengan suasana di pedalaman, lembah-lembah dan pesisir pantai di Papua. Karena menerima informasi yang tidak lengkap atau yang tidak benar banyak orang di wilayah pedalaman tumbuh menjadi komunitas ‘pemimpi’ yang meninggalkan aktifitas harian mereka dan mulai menunggu ‘hari baru’ yang menurut sejumlah tokoh akan datang segera, entah kapan. Orang tua mulai tidak memperhatikan pendidikan dan masa depan anak-anaknya dan membiarkan untuk kebutuhan tersebut dipenuhi oleh ‘hari baru’ yang dinantikan.

Atau pada kenyataan pahit lainnya yang selama ini dirasakan masyarakat Papua dalam kaitannya dengan kepemilikan sumber daya alam. Kapan saja dengan tiba-tiba keseharian hidup orang Papua dikejutkan oleh sebuah perusahaan dengan personil dan alat-alat beratnya masuk ke wilayah Ulayat mereka dengan tujuan mengambil hasil hutan atau tambang, hanya karena mengantongi izin operasi dari pemerintah (Jakarta). Mereka sebagai pemilik Ulayat yang tidak pernah diinformasikan hingga dimintakan persetujuannya atas rencana kegiatan dari perusahaan tersebut.

TOLERANSI – MENGHARGAI

Masyarakat kita majemuk, baik dari segi suku, dari segi agama, dari segi latarbelakang budaya dst. Suasana damai mengandaikan bahwa kita berusaha untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Bukan saja suatu toleransi – menerima saja perbedaan warga serta budayanya – melainkan lebih aktif menghargai kekayaan yang terungkap dalam perbedaan yang ada, dan menghayati kesatuan sebagai umat manusia yang semartabat. Inilah berarti suatu toleransi, lebih baik lagi penghargaan terhadap keyakinan atau pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan keinginan atau pikiran kita. Apalagi kita diminta untuk terbuka terhadap nilai-nilai dari luar tanpa meninggalkan nilai-nilai yang kita anut secara turun-temurun (adat-istiadat).

Sikap memberikan kesempatan bagi tumbuh kembangnya perbedaan yang nyata dewasa ini, turut menentukan dalam menciptakan suasana hidup yang damai di Tanah Papua. Kondisi birokrasi di Papua mulai mengarah kepada paham Papuanisasi yang sempit, artinya: yang penting sesuku dengan kami, yang penting orang gunung atau sebaliknya; sikap demikian merupakan potensi konflik yang sangat fatal dikalangan orang Papua sendiri.

Begitu pula sikap yang toleran sekaligus kritis (!) akan banyak membantu kita dalam memahami secara arif isu-isu bernuansa SARA yang berkembang di Papua belakangan ini seiring dengan kehadiran berbagai kelompok yang mengatasnamakan agama dan ideologi tertentu seperti Laskar Jihad, Laskar Kristen, Barisan Merah Putih, Satgas Papua, kelompok Soranda dan kelompok sektarian lainnya yang berpotensi menciptakan konflik.

KESEJAHTERAAN

Kita semua mesti makan, dan tidak bisa bahwa sebagian masyarakat kaya sedangkan yang lain menderita karena lapar, miskin dsbnya. Misalkan, dalam adat Dani isi penugasan pemimpin berpusat pada “menjaga kesuburan”, artinya seluruh masyarakat memiliki peluang untuk berkembang, untuk memiliki akses pada kekayaan yang dimiliki bersama, seperti tanah atau peluang ekonomis lainnya. Sama halnya berhubungan dengan peluang

kesehatan, peluang pendidikan. Tanpa pemerataan kesejahteraan tidak akan ada damai. Unsur dasar ini menyangkut banyak kebijakan dalam politik praktis. Perlu suatu perjuangan yang kuat untuk menghindarkan masyarakat Papua yang dewasa ini dililit :

- kemiskinan,
- angka kematian yang tinggi,
- berbagai penyakit mematikan seperti HIV/AIDS-TBC-disentri-malaria akut,
- minimnya pendidikan,
- dll

Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dalam era Otonomi Khusus yang kebanjiran 'uang' saat ini, perlu diawasi baik agar berbagai program yang dibuat dapat berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Secara khusus peranan segala perusahaan perlu ditinjau kembali dan ditertibkan hingga menjadi penunjang yang aktif dan kreatif bagi masyarakat setempat.

RASA AMAN

Semua warga berhak untuk hidup dalam ketenteraman hingga merasa aman, dan merasa tak terancam atau diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak mana saja. Dalam kerangka ini penegakan hukum sangat perlu ditonjolkan, dan penghargaan atas hak-hak dasar setiap warga perlu terwujud. Perwujudan unsur ini juga mengandaikan bahwa terdapat suatu "kemauan politik bersama" untuk menciptakan suasana damai. Selama ada pihak yang kurang menghendaki suatu suasana damai karena takut kehilangan peluangnya untuk 'mengambil keuntungan', atau karena "punyai agenda tersendiri" kita akan mengalami bahwa keamanan kita tetap tidak terjamin.

KEADILAN dan KEBENARAN

Dua nilai ini merupakan nilai-nilai yang sangat dasariah dalam segala lalu lintas sosial kita. Bukan rahasia lagi bahwa banyak hal masih perlu diperjuangkan mengingat bahwa banyak di antara kita merasa sakit hati karena dilukai secara mendalam di masa yang lampau, menjadi korban dari suatu 'ideologi' atau permainan kuasa (nasional maupun internasional); sudah terlalu banyak korban dituntut. Berbagai langkah strategis maupun praktis dapat diefektifkan untuk mewujudkan nilai-nilai ini, misalnya melalui advokasi, penelitian, pengungkapan fakta, mediasi, negosiasi, dll.

Selain memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar lingkungan harian kita, hal yang sama perlu juga diperjuangkan didalam kerangka adat kita sendiri dimana masih terdapat kebiasaan adat budaya yang melanggar / mengekang; misalkan adat yang tidak adil terhadap status perempuan perlu diperjuangkan agar berubah dan memberi tempat yang sama bagi berkembangnya hak-hak perempuan disamping laki-laki.

KEMANDIRIAN

Kita semua mau supaya dapat merasa diri sebagai “tuan rumah”, hingga tidak dapat dijadikan ‘obyek’ urusan orang lain saja. Dalam hubungan dengan ini “mental proyek” dan menggantungkan diri pada “kebaikan” orang lain sangat mengganggu. Segala harga diri telah hilang karena banyak warga dipakai sebagai alasan proyek saja, dan malahan warga-warga yang bersangkutan makin mulai bertingkah laku sebagai “orang miskin”, “orang yang perlu / mau dibantu”. Maka, unsur kunci ini mengundang kita untuk sendiri mengambil inisiatif, untuk berusaha sekemampuan kita dengan apa adanya pada kita.

HARGA DIRI dan PENGAKUAN

Berkaitan dengan unsur ini sudah jelas bahwa harga diri bangsa Papua sangat ditekan sampai sering sudah hilang, malahan sampai banyak warga Papua mulai melihat diri sebagai “orang minder”, “orang primitif”. Sikap demikian menjadi hasil dari suatu suasana diskriminatif selama puluhan tahun. Sudah saatnya kita bangkit dan menunjukkan kebolehan kita, kebolehan warisan serta kebudayaan kita, sambil menghargai kebolehan orang lain yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Sejumlah nilai dalam adat kita dapat dijadikan pegangan yang kuat, hingga dapat tetap menunjang rasa percaya diri sambil membuka diri terhadap “dunia yang baru”. Perjuangan untuk menegakkan kembali harga diri kita yang diinjak-injak begitu lama bisa a.l. melalui perjuangan ditegakkannya HAM.

Tidak lupa kita sendiri sebagai orang Papua, sejauh mana tindak-tanduk dan pola hidup kita menunjukkan aspek ini. Misal, bagaimana bisa dihargai apabila kita sendiri hidup sembarangan: mabuk-mabukan, masuk bar, tidak kerja di kantor dengan baik, tidak mau kerja kebun, dll. Karena itu, harga diri kita bergantung juga pada tingkah laku dan kebiasaan hidup kita sendiri. Dengan demikian tuntutan ditegakkannya ‘harga diri’ kita sangat erat kaitannya dengan keyakinan dan cara kita menjalani hidup sehari-hari.

Unsur pengakuan: bukan saja setiap orang perlu dan mau diakui dalam keberadaannya, namun juga kita sendiri perlu secara aktif mengakui nilai martabat orang lain. Setiap upaya, termasuk membangun budaya damai, dimulai dengan saling mengakui eksistensi setiap pribadi yang kita temui. Hal ini menuntut dari kita semua untuk membuka diri terhadap suatu dunia yang baru yang de facto ada, dimana ada tempat bagi banyak orang walau berbeda suku, agama, budaya dsbnya., dan dimana tidak ada tempat bagi seorang yang menilai diri lebih berharga daripada sesamanya. Dalam mata Tuhan Allah kita semua seharga dan semartabat!

KEUTUHAN / HARMONI

Sebenarnya kita semua adalah bagian dari suatu kesatuan yang jauh lebih luas daripada diri kita; seluruh alam semesta merupakan 'rumah tinggal' kita, dan lazimnya dalam adat keutuhan alam semesta ini sangat diakui, dihayati dan dijaga betul. Kita tidak terlepas dari alam sekitarnya, tanah, margasatwa dll. Penghayatan keutuhan ini terungkap dalam "gaya memanfaatkan alam", maka terungkap dalam kebijakan-kebijakan yang menjaga kelestarian alam / lingkungan kita.

Corak eksploitatif yang selama ini identik dengan dinamika pembangunan di Tanah Papua dimana tanah yang diambil alih dan hutan yang dibabat habis demi berbagai program: transmigrasi, pertambangan, pengolahan kayu; sungai dan laut yang tercemar akibat berbagai aktifitas pemodal, tidak bisa dipisahkan dari gerak perjuangan menegakkan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pola pembangunan berkelanjutan yang turut memperhitungkan nasib generasi mendatang, perlu diperjuangkan agar tercermin dalam berbagai kebijakan pembangunan yang mau diterapkan di Papua.

Lingkungan sungguh terancam dikala fokus pembangunan di era otonomi (bahkan Otonomi Khusus) saat ini bertumpu pada pencapaian keuntungan daerah yang sebesar-besarnya dengan mengandalkan pada kegiatan eksploitasi sumber daya alam melalui modal besar. Bayangan kekelaman hidup manusia Amungme dan Kamoro di areal PT Freeport, Timika; sejumlah komunitas Masyarakat Adat di Sorong, Merauke, Wasior-Manokwari, pesisir Jayapura dan daerah lainnya yang sudah kehabisan areal hutan alamnya karena ditebang pemegang HPH; atau kemungkinan yang akan terjadi bersama ketidakberdayaan masyarakat kecil yang terisolasi pula di Teluk Bintuni dengan masuknya perusahaan LNG Tangguh; mungkin berguna untuk kita merefleksikan bersama guna membantu merumuskan upaya membangun budaya damai yang turut membebaskan bangsa Papua dari ketertindasannya.

SASARAN UMUM LOKAKARYA

Kenyataan sebagaimana diuraikan diatas mengajak kita untuk mencari jalan supaya masa depan Papua lebih cerah. Maka, sasaran lokakarya pada 25 - 30 November 2002 dapat dirumuskan sbb.:

1. Mempertemukan sejumlah 'penggerak/pelaku' yang boleh diandaikan berniat dan ingin melibatkan diri dalam karya "membangun budaya damai".

2. Mencapai suatu pemahaman yang mendalam mengenai komponen-komponen operasional “membangun budaya damai” sebagai suatu pegangan bersama.
3. Mencapai suatu pola “pembagian tugas” dan pola kemitraan menyangkut setiap komponen operasional.
4. Merumuskan suatu program operasional awal menyangkut setiap komponen “membangun budaya damai”.

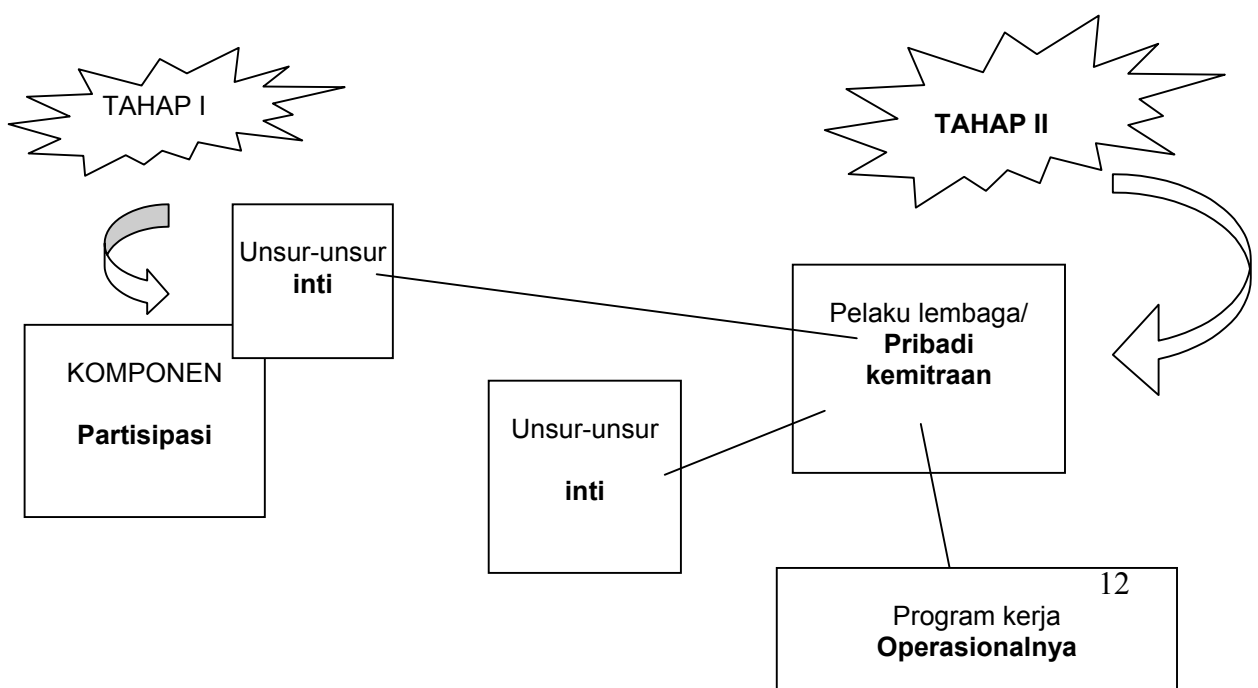
Mengingat sasaran tersebut di atas proses berjalannya lokakarya dapat digambarkan dalam tiga tahap sebagai berikut:

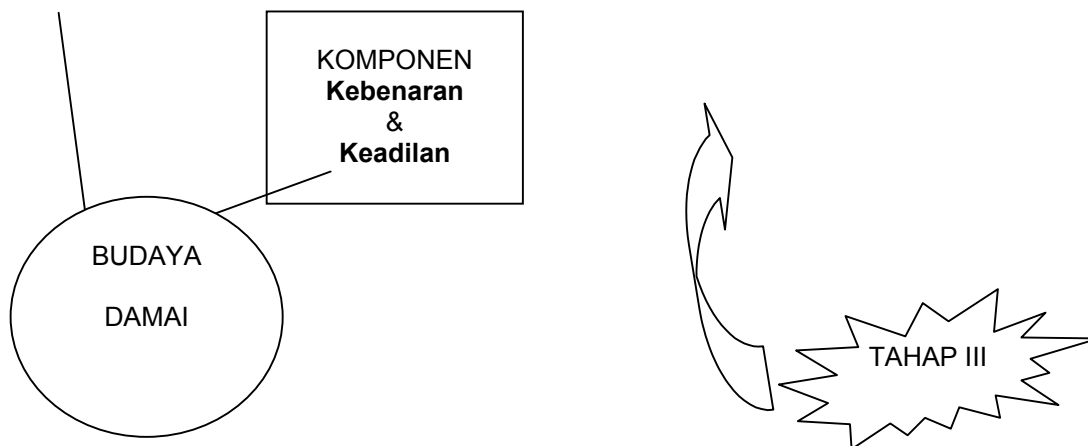
Tahap I : melengkapi gambaran komponen yang ada kaitannya dengan “membangun budaya damai”, dan menguraikan isinya – unsur-unsur inti - setiap komponen.

Tahap II : mengaitkan setiap komponen dengan identitas lembaga/pribadi (siapa-siapa?) yang dapat berperan pada aspek “membangun budaya damai” tertentu, dan yang berniat untuk berkomitmen dengan karya pada aspek khusus itu.

Tahap III : para penggerak/pelaku yang berkomitmen untuk menangani salah satu komponen “membangun budaya damai” merumuskan bersama suatu program operasional awal.

Secara garis besar proses bertahap ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Sesuai dengan tahap-tahap yang ingin kita lalui, maka **JADWAL KEGIATAN** adalah sbb.:

KEGIATAN	BAHAN	CARA KERJA	LAMANYA	FASILITASI
Tgl. 25 Nov. 02 Penerimaan Peserta	Pendaftaran Penempatan	Administratif Pergaulan bebas Makam malam	14.00 – 19.00 19.00	Staf SKP
Tgl. 26 Nov. 02 Pembukaan	Sambutan Perkenalan	Sesi pleno	08.30 – 09.30	Staf SKP
Pengarahan	Acuan lokakarya	Presentasi Keterangan Proses kerja	10.00 – 11.00 11.30 – 12.30 12.30 – 13.00	Theo v.d.Broek
TAHAP I Pemahaman	Acuan lokakarya	Kelompok diskusi Rangkuman Buka Puasa	16.30 – 18.30 18.30 – 19.00 19.00 – 20.00	Staf SKP Sekretariat
Tgl. 27 Nov. 02	Rangkuman hasil diskusi	Presentasi Keterangan Kesimpulan	08.30 – 09.15 09.15 – 09.45 09.45 – 10.00	Hardus Desa Theo v.d. Broek
	Revisi pemahaman	Kelompok diskusi Sesi pleno Penetapan pemahaman	10.30 – 11.30 11.30 – 12.30 12.30 – 13.00	Staf SKP Hardus Desa
TAHAP II Kemitraan	Daftar lembaga / kemitraan	Kelompok diskusi Rangkuman hasil diskusi	16.30 – 18.30 18.30 – 19.00	Staf SKP Sekretariat
Tgl. 28 Nov. 02	Rangkuman hasil diskusi	Presentasi Keterangan Kesimpulan	08.30 – 09.15 09.15 – 09.45 09.45 – 10.00	Sostenis Sumihe Theo v.d. Broek
	Revisi kemitraan	Kelompok diskusi Sesi pleno Penetapan kemitraan	10.30 – 11.30 11.30 – 12.30 12.30 – 13.00	Staf SKP Sostenis Sumihe

TAHAP III Program operasional	Penyusunan program awal / operasional	Kelompok diskusi	16.30 – 18.30	Staf SKP
		Rangkuman hasil diskusi	18.30 – 19.00	Sekretariat
Tgl. 29 Nov. 02	Rangkuman hasil diskusi	Presentasi 1	08.30 – 09.15	Hardus Desa
		Keterangan 1	09.15 – 09.45	Theo v.d. Broek
		Kesimpulan 1	09.45 – 10.00	Hardus Desa
		Presentasi 2	10.30 – 11.15	Theo v.d. Broek
		Keterangan 2	11.15 – 11.45	
Kesimpulan 2	11.45 – 12.00			
		Sholat	12.00 – 13.00	
	Pembulatan diskusi	Penetapan program awal	16.30 – 17.30	Theo v.d. Broek
	Tindak lanjut	Koordinasi	17.30 – 18.30	Sostenis Sumihe
Penutupan	Sambutan & Kesimpulan	Sesi pleno	18.30 – 19.30	Staf SKP

Theo van den Broek
Jayapura

SKP